

Kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap Eksistensi Pendidikan di Indonesia 1929-1973


 **A. Fatikhul Amin Abdullah**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

 f4tih85@gmail.com


 **Mohammad Iskandar**

Universitas Indonesia, Indonesia

 abahsepuh2009@gmail.com

 **Muhammad Hadiatur Rahman**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

 hadiatur@iainmadura.ac.id

*Korespondensi: f4tih85@gmail.com

Article Information

Dikirim: 1 Februari 2024

Revisi: 11 Juni 2024

Diterima: 19 Juni 2024

Terbit: 30 Juni 2024

Kata Kunci:

Nahdlatul
Ulama, Pendidikan,
Pesantren, Sekolah

Abstrak

This research is motivated by the assumption that Nahdlatul Ulama is an organization that is not concerned with education. Whereas several contributions have been made by Nahdlatul Ulama in participating in advancing national education in Indonesia. This research proves the contribution of Nahdlatul Ulama to the current national education structure. For this reason, the method used is the historical research method and the method for collecting data with document studies, literature studies, and observation,. This study uses Anthony Giddens' structuration theory of agent, agency, structure, and duality of structure. This research produces evidence that the birth of the Joint Decree of Three Ministers is one part of the effort to recognize Islamic education by the state by accommodating existing madrasas for the pioneers of Nahdlatul Ulama figures as agents of change from the existing structure.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya anggapan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang tidak kosen terhadap Pendidikan. Padahal terdapat beberapa kontribusi yang telah dilakukan Nahdlatul Ulama dalam ikut serta memajukan Pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dan metode untuk mengumpulkan data dengan studi dokumen, studi literatur, observasi,. Studi ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens tentang agen, agensi, struktur, dan dualitas struktur. Penelitian ini menghasilkan satu bukti bahwa lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri merupakan salah satu bagian dari upaya diakuinya Pendidikan Islam oleh negara dengan mengakomodir madrasah yang ada atas pelopor para tokoh Nahdlatul Ulama sebagai agen perubahan dari struktur yang ada.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Al-Quran surat *Al Mujadalah* ayat 11 Yang artinya: “.....Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.....” Tuhan telah menjanjikan akan meninggikan derajat manusia yang beriman dan berilmu (berpendidikan). Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menyosialisasikan gagasan-gagasan baru dan dalam proses pendidikan ditanamkan berbagai nilai kehidupan yang dijadikan sebagai panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu yang dianggap benar. Kebenaran hakiki bersumber dari agama. Oleh sebab itu, pendidikan agama menjadi sangat penting bagi perkembangan generasi agar mampu bertindak dengan benar demi mencapai kebahagiaan.

Pergaulan bebas, berjudi dan penggunaan obat terlarang sekarang ini marak terjadi karena kebenaran agama Islam mulai luntur dan ditinggalkan. Padahal, maju mundurnya sebuah bangsa tergantung pada seberapa kuat penganut agama berpegang teguh pada ajarannya. Bangsa barat maju karena mengambil kekayaan yang dipancarkan oleh alquran, sedangkan kaum muslim mundur karena meninggalkan ajaran-ajarannya sendiri. Oleh sebab itu pendidikan agama khususnya Islam sangat penting dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Baik buruknya bangsa ini tergantung pada pemahaman dan penerapan orang Islam terhadap agamanya. Indonesia bukan negara yang baru mengenal pendidikan setelah datangnya bangsa barat (kolonial) tapi jauh sebelum itu telah memiliki pola dan bentuk pendidikan asli (*indegenous*) yang dikenal dengan Pesantren sebagai bentuk pendidikan Islam tradisional.

Pesantren tidak bisa dilepaskan dari tradisi sistem pendidikan sebelumnya. Nilai yang terkandung di dalamnya bukan semata-mata ke-Islaman, melainkan juga mengandung makna keaslian (*indegenous*) Indonesia¹. Sebab lembaga yang serupa sudah terdapat pada masa kekuasaan Hindu-Budha, sedangkan Islam meneruskan dan mengislamkannya. Pendidikan Islam tradisional (Pesantren) sebelum abad ke-20 tidak mengenal sistem kelas yang

¹ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992).

lebih menekankan pentingnya mempelajari ilmu-ilmu keislaman (*al-tafaqquh fi al-din*) daripada ilmu umum. Pesantren tradisional dikenal dua metode pembelajaran. *Pertama*, *Bandongan* atau *Weton*. *Kedua*, sistem tutorial atau *Sorogan*. Selain itu, juga ada metode hafalan. Santri juga dituntut untuk menghafal Al Quran atau beberapa ayat atau surat sebagai pengantar memahami teks suci tersebut, termasuk hadis, syair arab, *nadlom*, *mahfudlot*, kaidah-kaidah keilmuan dan kata mutiara dalam bahasa arab. Kalangan yang belajar di pesantren tidak dibatasi dari strata sosial mana pun mulai dari priyayi sampai rakyat biasa. Pembelajaran di pesantren tradisional tidak mengenal ujian dan ijazah sebagai tanda kelulusan. Keilmuan santri diukur dari kitab-kitab yang sudah dipelajari terlepas paham atau tidak isi dari kitab yang dikaji. Oleh sebab itu, tidak ada ukuran yang jelas dan akurat tingkat kompetensi lulusan pesantren.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan sejak kehadiran bangsa barat (kolonial). Pendidikan masa kolonial dimulai sejak masuknya bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris untuk melestarikan penjajahan. Pembaharuan pendidikan di Nusantara baru muncul masa pemerintahan Hindia Belanda saat diangkatnya Inspektur Pendidikan Pribumi yang pertama², J.A. Van der Chijs (1820-1898)³, pada tahun 1864. Dia sangat setuju kalau sekolah pribumi diselengi dengan kebiasaan pribumi. Namun, walau begitu Chijs tidak menerimanya karena dinilai kebiasaan tersebut terlalu jelek tampak pada tradisi didaktis pendidikan pribumi terutama metode membaca teks arab yang hanya dihafal tanpa pengertian. Padahal sebelumnya, Cornelis Brugmans (1820-1890) membicarakan penelitian Gubernur Jendral Van der Capellen (1779-1848)⁴ dan menjabat (1816-1826) melalui adiknya yang menjabat sebagai Residen Cianjur, Letnan Kolonel Jonkher Robert Lieve Jasper van der Capellen, dia membuka sekolah kecil yang diperuntukkan anak-anak pribumi.

Van der Capellen hendak melaksanakan satu jenis pendidikan yang berdasarkan pribumi murni. Dia ingin membuat pendidikan secara teratur dan disesuaikan dengan masyarakat desa yang erat hubungannya dengan pendidikan Islam⁵ seperti yang sudah ada sebelumnya⁶. Namun, karena alasan

² Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994).

³ Pegawai pemerintah Kolonial Belanda yang secara penuh bekerja untuk pendidikan orang bukan Eropa.

⁴ Berdasarkan surat keputusan tanggal 8 Maret 1819 pernah memerintahkan mengadakan suatu penelitian tentang pendidikan masyarakat Jawa.

⁵ Pendidikan Islam yang dimaksud pendidikan Pesantren

⁶ Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*.

tersebut sistem pendidikan pribumi (khususnya pendidikan Islam) tidak dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum⁷. Sejak itu sekolah Islam mengambil jalan sendiri lepas dari pemerintah yakni tetap pada tradisi sendiri, tetapi terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut. Awal abad ke-20⁸, pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dengan pendidikan Belanda maupun pendidikan yang dilaksanakan Departemen pendidikan dan kebudayaan⁹. Seiring dengan waktu ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama agar tidak ada persepsi atau kesan dualisme pendidikan antara umum dan agama.

Pemerintah kolonial telah mendirikan beberapa sekolah sebagai tempat pendidikan dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Masa-masa awal sekolah hanya didirikan di pusat-pusat pemerintahan saja, seperti ibukota provinsi, ibukota keresidenan, ibukota kabupaten. Butuh waktu agak lama pemerintah kolonial Belanda untuk secara bertahap mampu menyediakan pendidikan untuk rakyat pribumi yang sifatnya massal, yaitu bersamaan dengan diberlakukannya *ethische politiek* (politik etis)¹⁰. Pelaksanaan politik etis bidang pendidikan terutama adalah J.H. Abendanon (1852-1925), yang menjadi Direktur Pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900-1905. Sistem persekolahan yang dibangun pemerintah Belanda mula-mula dibuka hanya untuk kalangan mereka sendiri, baru kemudian untuk penduduk pribumi, yang sifatnya juga terbatas untuk anak pegawai Belanda dan anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang punya kedudukan dalam masyarakat.

Akhir era abad ke 19 dan awal abad ke 20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi masyarakat Indonesia mulai dari ELS (*Europeesche Lagere School*) atau Sekolah Dasar bagi orang Eropa tahun 1902, HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*) atau Sekolah Dasar bagi pribumi tahun 1914, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) atau Sekolah Menengah tahun 1914, AMS (*Algeme(e)ne Middelbare School*) atau Sekolah Atas tahun 1919, dan HBS (*Hogere Burger School*)¹⁸⁷⁵ atau Pra-Universitas. Memasuki abad ke 20, Belanda

⁷Gubernur Jendral Van der Capellen 1819 M mengeluarkan surat edaran kepada para Bupati “dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara”. Hal ini menunjukkan pendidikan agama Islam di Pesantren, Masjid, Musholla, dsb. Dianggap tidak membantu Belanda dan santri pesantren masih dianggap buta huruf.

⁸ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

⁹ Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*.

¹⁰ Steenbrink.

memperdalam pendidikan di Indonesia dengan mendirikan sejumlah Perguruan Tinggi bagi penduduk Indonesia di pulau Jawa.

Tahun 1878, telah didirikan sekolah pimpinan pemerintahan (*Hoofden-schollen*). Pada mulanya sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak kaum bangsawan (*elite*) tetapi kemudian menjadi lembaga pendidikan para pegawai pemerintahan pribumi atau *ambtenar* yang pada masa itu lebih dikenal sebagai sekolah *pangreh praja*. Pada 1899, C.Th. Van Deventer¹¹ masa periode politik etis, atau periode setelah 1900-an, terjadi perubahan penting dalam proyek pendidikan kolonial, baik dalam bentuk reorganisasi sekolah maupun pembukaan sekolah-sekolah baru. Tahun 1900 *Hoofden-schollen* mengalami reorganisasi dan diberi nama baru, yakni OSVIA. Di Bandung, sebagian muridnya berasal dari Jawa Barat. OSVIA di Magelang, menarik siswa-siswa dari Jawa Tengah, sedangkan OSVIA di Probolinggo bagi siswa dari Jawa Timur. Pada tahun 1927 seluruh cabang OSVIA digabungkan menjadi MOSVIA (*Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) yang berpusat di Magelang. Selain itu didirikan pula *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) tahun 1898 atau Sekolah Kedokteran di Batavia, *Nederland-Indische Artsen School* (NIAS) tahun 1913 atau Sekolah Kedokteran di Surabaya, *Rechts Hoge School* (RHS) tahun 1924 atau Sekolah Hukum di Batavia, *De Technische Hoges School* (THS) tahun 1920 atau Sekolah Teknik di Bandung.

Sejak diperkenalkan HIS (*Hollands Inlandsche School*) menggantikan sekolah kelas satu¹² tahun 1914, persekolahan Belanda mengalami kemajuan pesat¹³. Berlokasi di kota-kota, sekolah ini mula-mula disediakan hanya untuk anak-anak priyayi berpangkat, tetapi kemudian masuk pula anak-anak dari kelompok sosial yang lebih rendah. Sekolah kelas dua¹⁴ dirubah menjadi *Standaard-Schoolen*, atau "Sekolah Standar" yang diperuntukkan bagi yang ingin menggeluti perdagangan. Sementara bagi masyarakat desa yang ingin tetap hidup di lingkungan desa, disediakan Sekolah Desa "*Desaschoolen*" atau

¹¹Ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tujuh belas tahun (1880-1897) menerbitkan srtikel berjudul "*Een eereschuld*" (Suatu Utang Kehormatan) di Jurnal Belanda *de Gids*. Dua tahun setelah terbitnya artikel tersebut, secara resmi politik etis (*etische politiek*) disahkan yang di dalamnya memuat program pendidikan bagi pribumi kalangan menengah ke bawah.

¹²*Eeste Klasse School*(sekolah kelas satu) Didirikan pada tahun 1914 dengan lama belajar 4-5 tahun. Sekolah ini untuk anak golongan bangsawan Indonesia.

¹³Pada 1910 hanya terdapat sekitar 70 buah sekolah kelas satu, sejak penggantian ke HIS terdapat 350 buah, 150 diantaranya swasta, dengan murid sekitar 70.000 orang.

¹⁴*Tweede Inlandsche School* atau *Sekolah Kelas Dua* atau *Sekolah Ongko Loro* merupakan *Sekolah Rakyat* atau Sekolah Dasar dengan masa pendidikan selama Tiga Tahun dan tersebar di seluruh pelosok desa

“*Volkschoolen*”¹⁵ pada tahun 1907. Di atas Sekolah Desa ada *Vervolgschool*¹⁶ (Sekolah lanjutan) selama 2 tahun, dan *Schakelschool*¹⁷ selama 5 tahun, sekolah penghubung dari sekolah desa ke sekolah dasar berpengantar bahasa Belanda, sebelum kemudian dilanjutkan ke Pendidikan Menengah (*Middelbaar Onderwijs*), bahkan Pendidikan Tinggi.

Pada era akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20, umat Islam Indonesia digempur paham pembaharuan yang dipelopori oleh kaum reformis, di mana paham ini mengusung pemurnian/purifikasi ajaran Islam dari Arab Saudi¹⁸. Tidak henti-hentinya kaum pembaharu mengkritik secara kasar amalan para ulama dan kaum muslim tradisional, menurut pandangan kaum pembaharu/reformis dengan menggelorakan paham purifikasi ajaran Islam mereka menganggap amalan-amalan itu semuanya *bid'ah* tidak bersumber pada al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang *shahih*. Praktik yang dikritik itu seperti misalnya *tahlilan*, baca *ushalli* pada takbir pertama, *haul*, rakaat salat *tarawih*, mengunjungi (ziarah) kubur, *tawassul*, *tarekat* dan berbagai ritual keagamaan lain yang marak dilakukan oleh kaum muslim di Indonesia semenjak masuknya Islam sebagai bentuk akulturasi ajaran Islam dengan budaya setempat sejak zaman Wali Songo.

Seiring lahirnya golongan pembaharu/reformis Islam yang hanya mengakui Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber-sumber dasar pemikiran mereka. Mereka berkeyakinan bahwa *bab al ijtihad* (pintu ijtihad) masih dan tetap terbuka; mereka menolak *taqlid*. Dalam pikiran pembaharu berlakunya suatu fatwa, pemikiran atau perbuatan hendaklah dinilai dengan dasar Al-Qur'an dan Hadis¹⁹ dan berusaha menghapus *taqlid*²⁰, *bid'ah*²¹ dan tahayul/khurafat²² yang dipandang sebagai paham dan perbuatan yang berlawanan dengan syariat. Golongan ini mengakui pendidikan sangat penting untuk membina dan membangun generasi yang lebih muda. Perubahan dalam ide-ide tentulah akan mempunyai arti yang besar dan akan lama bertahan apabila perubahan-

¹⁵Pendidikan untuk golongan pribumi dimulai dari *Volkschool* (sekolah desa) dengan lama pendidikan 3 tahun dan menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar.

¹⁶Lama pendidikan 2 tahun, bahasa daerah masih digunakan sebagai pengantar dan lulusan *Vervolg School* bisa mengajar di *Volkschool*.

¹⁷*Schakelschool* merupakan sekolah peralihan dari penggunaan bahasa daerah ke bahasa Belanda sebagai pengantar

¹⁸ Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

¹⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, 8th ed. (Jakarta: LP3ES, 1996).

²⁰ Mengakui pendapat seseorang mujtahid atau ulama tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut.

²¹ Suatu amalan yang diadakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw.

²² Kepercayaan atau keyakinan kepada suatu perkara yang menyalahi ajaran Islam

perubahan tersebut mendapat tempat dalam kalangan generasi muda. Gerakan pembaharu ini dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang “menyaingi” sesama ulama, yaitu ulama tradisional. Golongan tradisional selalu memberi tekanan dalam soal fikih pada pelajaran tentang fatwa-fatwa dari berbagai macam mazhab, dan bukan ke arah memahami bagaimana fatwa-fatwa itu ditetapkan²³.

Kehadiran golongan pembaharu tersebut juga mempengaruhi perubahan sistem pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam seperti yang dilakukan golongan pembaharu dengan lahirnya Sekolah Adabiah (*Adabiah School*), Surau Jembatan Besi, Sekolah Thawalib, Madrasah *Al-Diniyah*, *Jami'at al-Khair*, *Al-Irsyad*, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam²⁴. Pendidikan Islam (Pesantren) mengalami perubahan yang sebelumnya diadakan di surau-surau, tidak berkelas, tidak memakai bangku, meja, papan tulis, tidak memiliki kurikulum, tidak mengenal tahun pelajaran, perlahan mengalami perubahan sedikit demi sedikit sampai sekarang berkelas, memakai bangku, meja, papan tulis, menggunakan kurikulum, dan menerapkan tahun ajaran²⁵. Sampai sekarang terdapat dua jenis pesantren yang masing-masing memiliki ciri yang berbeda-beda dengan istilah Pesantren *Salaf* (kuno/tradisional)²⁶ dan Pesantren *Kholaf* (modern)²⁷. Pada tahun 1926 kalangan Islam Tradisional berupaya menyatukan diri dalam organisasi yang sengaja dibuat untuk tetap menjaga Islam yang ramah dengan penuh toleransi terhadap budaya lokal dengan tanpa mempertentangkan antara ajaran agama dan budaya lokal selama memang masih bisa didialekkan antara keduanya. Lahirlah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama yang dipelopori KH Hasyim Asyari dengan ide dari tokoh ulama muda saat itu seperti KH Wahab Hasbullah dan ulama yang lain.

²³ Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*.

²⁴ Noer.

²⁵ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992).

²⁶ Pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama saja kepada para santri atau jika ada ilmu umum porsinya sangat sedikit. Metode yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu metode sorogan dan wetonan atau bandongan. Ciri-cirinya santri lebih hormat pada santri dan seniornya, kesehariannya memakai sarung, penerimaan tanpa seleksi dan tanpa mengenal waktu dan batasan umur, tidak memiliki kurikulum yang pasti, penguasaan lebih pada kitab kuning.

²⁷ Pesantren yang muncul sebagai anti-tesa pesantren salaf. Cara belajarnya memakai sistem klasikal, ilmu agama dan umum sama-sama dipelajari, penekanan bahasa asing Arab dan Inggris, penguasaan kitab kuning kurang, memiliki kurikulum baik sendiri maupun ikut pemerintah

Berbagai organisasi Islam sangat menjunjung tinggi dan memberi tempat terhormat bagi usaha-usaha pengembangan ilmu dan pendidikan karena ilmu pengetahuan menjadi bagian tak terpisahkan dengan ajaran Islam. Sehingga para ulama' banyak mengadakan pengajian-pengajian, mendirikan pesantren, dan usaha pendidikan lainnya. Seiring dengan usaha tersebut pada tahun 1916 di Surabaya didirikan semacam kursus perdebatan dalam rangka mencerdaskan dan menyadarkan martabat bangsa yang diberi nama *Taswirul Afkar* yang berkembang menjadi organisasi yang diberi nama *Jam'iyah Nahdlatul Wathon*. Organisasi ini bertujuan untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah secara teratur²⁸. Akhirnya setelah melalui berbagai peristiwa termasuk terkait dengan Komite Hijaz dan disebabkan karena meluasnya sayap Muhammadiyah dan Persatuan Islam di Jawa bahkan memasuki Jawa Timur, sampai-sampai ke Surabaya²⁹, maka lahirlah Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir sejak tanggal 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926 di Surabaya dan baru mendapat pengakuan resmi (*Rechpersoon*) dari pemerintah Belanda tanggal 6 Februari 1930 No. IX, Pasal II yang berbunyi, "Adapun maksud perkumpulan ini yaitu memegang dengan teguh pada salah satu dari mazhabnya imam empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris As Syafi'iyah (Syafi'i), Imam Malik bin Anas (Maliki), Imam Abu Hanifah an Nu'man (Hanafi), dan Imam Ahmad bin Hambal (Hambali)³⁰.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena bagi masyarakat Islam pendidikan agama Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan paling penting. Karena hanya Islam agama yang mengajarkan norma dari sekian banyak agama yang ada. Agama yang lain hanya mengajarkan nilai agama tanpa mengajarkan norma agama, padahal akan sangat kesulitan menanamkan nilai pada anak tanpa ada norma yang menjadi (teknis/aturan main) sebagai penuntunnya. Oleh sebab itu, NU sebagai organisasi/*Jam'iyah Diniyah* dalam perjalanan sejarahnya berupaya mengintegrasikan pendidikan di Indonesia antara pelajaran umum dan agama secara seimbang agar pendidikan di Indonesia tidak menjadi bentuk pendidikan sekuler seperti masa kolonial. Berangkat dari pemikiran itu muncul hasrat untuk mencari sumber-sumber terkait dengan kontribusi dan peran NU dalam pendidikan di Indonesia untuk dinarasikan dalam bentuk karya sejarah.

²⁸ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994).

²⁹ Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*; Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*.

³⁰ Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*; Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999); Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*.

Penelitian ini akan mencoba membuktikan bahwa NU memiliki kontribusi yang cukup besar pada pendidikan di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama yang berwujud dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional mengenai pendidikan. Walaupun secara keseluruhan NU tidak mampu mendominasi kebijakan pendidikan nasional agar sesuai dengan visi misi NU tapi paling tidak dengan mengupayakan pendidikan yang berlandaskan NU akan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Pandangan semacam ini sesuai dengan kaidah *ushul fikih (legal maxim)* yang berbunyi '*ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*' yang berarti apa yang tak mungkin terwujud seluruhnya, tak boleh ditinggalkan semuanya yang terpenting (di dalamnya).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam implementasinya metode sejarah terbagi menjadi empat tahap yaitu *Heuristik, Kritik, Interpretasi*, dan penyajiannya (*Historiografi*)³¹. Aktivitas pertama adalah *heuristik* mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penulisan yang relevan. Dalam hal ini berupa arsip yang akan diperoleh dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), surat kabar dan majalah sezaman diperoleh dari Perpustakaan Nasional. Hasil-hasil muktamar dan konferensi besar NU serta berbagai Surat Keputusan(SK) dan artikel tentang NU diperoleh dari perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pojok Gus Dur, dan Wahid *Institute* juga di kantor Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (PP LP Ma'arif NU)

Pada tahapan Kritik, dilakukan pembacaan terhadap semua sumber sejarah yang kemudian dipilah-pilah terkait dapat atau tidaknya untuk dipercaya untuk menjadi fakta sejarah dengan melakukan penyeleksian dan pengujian data melakukan kritik sumber baik intern maupun ekstern agar relevan dengan tema kajian ini. Setelah diperoleh fakta sejarah sebagai acuan dalam penulisan sejarah dilakukan interpretasi. Tahap ketiga adalah Interpretasi sejarah pada penelitian ini dengan menggunakan konsep beberapa ilmu bantu sosiologi, politik, dan pendidikan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil penelitian sejarah yang analitis dan ditemukan kebenaran yang objektif dari sejarah yang dijelaskan. Tahap keempat yakni penulisan hasil interpretasi terhadap fakta sejarah yang biasa disebut dengan istilah Historiografi. Untuk melaporkan semua hasil penelitian dengan tujuan publikasi karya ilmiah dan diseminasi lahirnya sejarah yang baru.

³¹ A. Fatikhul Amin Abdullah, *SEJARAH: Apa, Bagaimana, Dan Kenapa?(Perspektif Masa Kini)* (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2019), <http://repository.iainmadura.ac.id/297/>.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pendidikan Nahdlatul Ulama

Sesuai Hadis riwayat Bukhori Muslim *Khoirunnas Anfa'uhum Linnas* (Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain). Sejak berdiri 1926, NU menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi besar gerakannya. Cita-cita tersebut secara sistematis terformulasikan dalam *Mabadi' khaira ummah* (prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengupayakan terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang ideal dan terbaik)³². Hal ini didasari perintah Tuhan dalam Al-Qur'an (3:110) "jadilah engkau sebaik-baik umat..." sehingga memunculkan semangat untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain, bukan mengambil manfaat dari orang lain, memberi sumbangan/kontribusi kepada yang lain bukan mengharap disumbang.

Kontribusi dalam penelitian ini memiliki makna sumbangan atau segala sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu sesuatu agar berhasil atau memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun ke lapangan untuk menyukseskan suatu kegiatan tertentu. Bertolak dari definisi tersebut penelitian ini berupaya membuktikan aksi nyata sebagai bentuk keikutsertaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mulai tahun 1929-1973 dalam bentuk berbagai kebijakan dan sistem pendidikan yang berlaku secara nasional di bawah Kementerian Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang tidak bisa lepas dari ruang lingkup waktu dan tempat. Fokus penelitian ini membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia maka secara spasial meliputi segala bentuk pandangan NU terhadap pendidikan, pembaharuan pendidikan Jam'iyah NU dan kebijakan nasional pada Kementerian Agama yang pernah lahir yang dipengaruhi NU atau kesengajaan NU dalam mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia yang kemudian diterapkan bagi seluruh pendidikan formal di bawah kendali Kementerian Agama.

Sedangkan ruang lingkup temporal akan menjelaskan antara tahun 1929 sejak dibentuknya bidang *Onderwijs*/pengajaran yang kemudian bermetamorfosis tahun 1938 menjadi Lembaga Pendidikan Ma'arif khusus untuk menangani pendidikan di lingkungan NU di bawah naungan Pengurus Besar

³² Aceng Abdul. Dkk Aziz DY, *Islam Ahlusunnah Waljamaah: Sejarah, Pemikiran, Dan Dinamika NU Di Indonesia*. (Jakarta: PP LP Ma'arif NU, 2015).

Nahdlatul Ulama (PBNU). Walaupun dalam penjelasannya akan menyinggung pendidikan sebelum tahun 1929 sebagai latar belakang atau bahan pembanding dan landasan pemikiran pendidikan NU. Adapun batasan akhir waktu penelitian ini sampai tahun 1973 karena buruknya hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru yang membawa dampak terputusnya kader NU untuk memegang kendali di Kementerian Agama sehingga yang sebelumnya Menteri Agama selalu diisi kader NU berpindah selain NU. Walaupun demikian penjelasan akan tetap berlangsung setelah tahun tersebut karena terjadi perubahan paradigma pendidikan Islam khususnya pada level Pendidikan Tinggi Islam. Sebelumnya tampak terdapat dikotomi antara Ilmu Pengetahuan umum dan agama sehingga Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Agama hanya menyediakan ilmu keagamaan tanpa ilmu umum. Maka perubahan status Perguruan Tinggi Islam dari Institut menjadi Universitas yang di pelopori oleh IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2002 yang kemudian diikuti oleh Perguruan Tinggi Islam yang lain.

Penulis mencoba untuk menerapkan teori dari Anthony Giddens tentang agen, agensi, Struktur, strukturasi, dan dualistis struktur. Anthony Giddens mengintegrasikan pelaku dan struktur. Ia melakukan kritik terhadap fungsionalisme Parson, Interaksionisme Goffman, Marxisme, Strukturalisme Saussure, Post-Strukturalisme Foucault/Derrida dan sebagainya. Adanya subjektivisme dan objektivisme yakni cara pandang yang memprioritaskan tindakan atau pengalaman individu di atas segalanya dan juga sebaliknya. Menurut Giddens objek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial seperti dalam fungsionalisme Parson, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme Levi-Strauss, bukan pula keunikan situasional seperti dalam interaksionisme Goffman, bukan keseluruhan, bukan sebagian dan bukan pula perorangan, melainkan titik temu keduanya, yaitu praktik sosial yang berulang serta terpola dalam lintas ruang dan waktu.

Bagi Giddens hubungan pelaku (*Agent*) dan struktur (*structure*) memiliki perbedaan yang jelas tapi memiliki hubungan dualitas bukan dualisme. Dan sentralitas ruang (*space*) dan waktu (*time*) bukanlah arena tindakan melainkan unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian masyarakat yang menempati posisi utama atau sangat sentral. Sehingga Anthony Giddens menamai teorinya Strukturasi. Jadi menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu³³.

³³ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010); Anthony Giddens, "The Constitution of Society:

Agen adalah pelaku, tindakan, aktor yang menunjuk pada orang atau kelompok yang memiliki kemauan dan kemampuan merubah struktur dalam proses sosial dan interaksi. Dalam hal ini *Jam'iyah*/organisasi Nahdlatul Ulama sebagai agen sebuah perubahan khususnya sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan akan terjadi jika agen memiliki power baik alokatif atau otoritatif yang berbentuk *resources* (sumber daya). NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia yang beranggotakan masyarakat kalangan bawah dengan tingkat militansi atas ajaran yang kuat merupakan sumber daya (*resources*) yang besar untuk melakukan sebuah perubahan. Selain itu, kader-kader NU tidak sedikit yang terlibat dalam pemerintahan baik tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di tahun sekitar 1929-1973.

Struktur sebagai perangkat aturan atau sumber daya yang terorganisasikan secara rutin, berada di luar ruang dan waktu dan ditandai dengan ketiadaan subjek. Sistem sosial secara rutin melibatkan struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia dan direproduksi disepanjang ruang dan waktu. Sedangkan strukturasi mempelajari bagaimana sistem itu tertanam dalam aktivitas aktor yang berpegang pada aturan dan sumber daya dalam tindakan, diproduksi dan direproduksi dalam interaksi.

Struktur tidak berada di luar tapi berada di dalam individu dalam praktis sosial. Menurut Giddens struktur tidak hanya bersifat mengekang (*constraining*) tapi juga memberdayakan (*enabling*). Struktur akan menjadi *enabling* atau *constraining* tidak bisa dipisahkan, bagaikan tangga setengah dari ketinggian yang kita tuju. Tergantung kemampuan untuk memanfaatkan, mengakses *resources* (sumber daya)³⁴.

Ada dimensi struktur yang terdiri dari signifikansi, Dominasi, dan Legitimasi. Ada juga modalitas (sumber daya yang menjelaskan dimensi utama dari dualitas struktur dalam interaksi yang menghubungkan kapasitas pengetahuan para agen dengan bagian struktural) yang dipakai seorang agen untuk melakukan interaksi dalam sistem sosial berupa skema interpretatif, fasilitas, dan norma. Sedangkan bentuk interaksi yang terjadi dari struktur dan agen dengan memanfaatkan modalitasnya berupa komunikasi, kekuatan, bahkan sanksi. Sehingga para aktor tidak hanya mampu memonitor aktivitas-aktivitas mereka sendiri tetapi juga aktivitas orang lain dalam perulangan perilaku sehari-hari. Adapun skema interpretatif merupakan cara penjenisan (*typifikasi*) yang tersimpan dalam gudang pengetahuan para aktor sebagai bekal yang diterapkan

Outline of The Theory of Structuration," in *Practicing History*, ed. Gabrielle M Spiegel (New York: Routledge, 2005).

³⁴ Giddens, "The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration."

secara reflektif ketika melangsungkan komunikasi yang digunakan dalam produksi dan reproduksi sosial saat interaksi.

Nahdlatul Ulama merupakan *Jam'iyah* (Organisasi) yang menunjukkan sikap fleksibilitas. Hal ini berkebalikan dengan pemikiran gerakan purifikasi dalam dunia Islam yang mengklaim dirinya sebagai pembaharu '*modernis*'. Tradisionalisme tidak lagi diidentikkan sebagai konservatisme yang membawakan dekadensi dan kebekuan walaupun pengikutnya dicibir sebagai penghambat kemajuan. Namun, NU justru menegaskan kehadirannya dengan melakukan identifikasi diri yang luar biasa. NU mampu menyerap dengan vitalitas yang cukup saat berhubungan dengan peradaban sosial dalam bentuk yang rasional. Gagasan reformasi dan transformasi berkembang di kalangan NU sehingga menjungkirbalikkan pandangan yang *taken for granted* (meremehkan) terhadap NU. Hal ini menunjukkan bukti kapasitas NU dalam menyesuaikan keharusan agama di berbagai realitas kehidupan dengan prinsip keagamaan *Al-'Adah al-Muhakkamah* (Sebuah tradisi dapat menjelma menjadi pranata sosial keagamaan). Dengan kata lain NU mampu menghadapi dunia modern dengan cara yang dinamis tanpa harus kehilangan pesan-pesan moralnya³⁵(*Tawasuth dan I'tidal, Tasamuh, Tawazun, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*) Koridor pemahaman Aswaja di NU adalah *taqdim an-nashsh 'ala al-'aql* (mendahulukan nash atas akal). Dan mengenal hirarki sumber ajaran Islam sebagaimana dilakukan oleh mayoritas umat Islam, yaitu mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*(kesepakatan *jumhur* ulama), dan *qiyas* (pengambilan hukum melalui metode analogi tertentu)³⁶.

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) yang dibidani dengan semangat pendidikan mengarahkan jalur perjuangannya ke arah pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan NU untuk masuk dalam kancah Pendidikan Nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita organisasi. Tiga tahun setelah berdiri pada muktamar yang ke-3 di Semarang tahun 1929 secara resmi NU membentuk bagian pengajaran/*Onderwijs* (sekarang Lembaga Pendidikan Ma'arif) dan ditegaskan dalam Mukhtamar XIII di Menes, Banten, pada tanggal 11 – 16 Juni 1938 telah membentuk divisi pendidikan yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ma'arif dengan harapan masalah pendidikan di Indonesia bisa tergarap dengan serius. Usaha yang dilakukan terkait dengan legalitas madrasah yang menjadi

³⁵ Greg dan Greg Barton Fealy, *Tradisionalisme Radikal. Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997).

³⁶ Aceng Abdul. Dkk Aziz DY, *Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah: Sejarah, Pemikiran, Dan Dinamika NU Di Indonesia* (Jakarta: LP Ma'arif NU, 2015); A. Fatikhul Amin Abdullah, "RITUAL AGAMA ISLAM DI INDONESIA DALAM BINGKAI BUDAYA," *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat 1* (September 23, 2018): 1–11, <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/asdanu/article/view/231>.

icon pendidikan NU untuk memiliki kesejajaran dengan sekolah-sekolah yang lain. Berbagai upaya NU dalam mencipta dan berkontribusi terhadap pemerintah mengenai pendidikan. Begitu juga berulang kali Indonesia membuat dan merevisi Sistem Pendidikan Nasional khususnya yang di bawah Kementerian Agama sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan di negeri ini tidak terlepas dari peran NU sebagai partai politik, *Jam'iyah*, dan atau melalui kader-kader NU yang duduk dalam pemerintahan³⁷.

Kontribusi NU dalam mewarnai dan membentuk wajah pendidikan di Indonesia termasuk ikut aktif dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional mulai dari awal sampai sekarang tidak bisa *dinafikan*. NU berkontribusi melalui berbagai rekomendasi hasil muktamar dan kebijakan menteri-menteri dari kader NU. Namun, selama ini sepertinya NU pasif terhadap Pendidikan di Indonesia karena jika dipandang secara umum kualitas pendidikan atau sekolah yang bernaung di bawah NU masih di bawah sekolah-sekolah bernaung pada selain NU dan jarang bahkan belum ditemukan penelitian tentang kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap sistem pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan/sekolah di bawah naungan Kementerian Agama mulai Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), dan Institut Agama Islam (IAI) baik negeri maupun swasta.

Kontribusi NU dalam Pendidikan

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan gerakan sosial yang dilandasi nilai-nilai agama seperti keridloan, keikhlasan, dedikasi perjuangan, keakraban, saling mempercayai, kejujuran dll³⁸. Nahdlatul Ulama berarti *Jam'iyah Diniyah* yang bermotif keagamaan, sehingga segala sikap, perilaku, karakteristik perjuangan selalu disesuaikan dan diukur dengan norma dan ajaran agama Islam *Ahlussunnah Wal jama'ah*³⁹, serta bercita-cita keagamaan yakni *Izzul Islam wal Muslimin* atau dengan kata lain tercapainya *Sa'adatud darain*⁴⁰ bagi umat dan warganya⁴¹. Meskipun demikian, ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) yang dianut oleh NU sendiri berbeda dengan yang dianut oleh umat Islam lain, yang

³⁷ A. Fatikhul Amin Abdullah, "Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama: Universitas Islam Malang Tahun 1981-2010" (Universitas Indonesia, 2021).

³⁸PP LP Ma'arif NU. *Landasan Dasar Kebijakan Pengembangan Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama'* dalam *Laporan Musyawarah Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif tanggal 8-11 April 1983 di Jakarta*. (Jakarta: LP Ma'arif NU. 1983). Hlm 9a.

³⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994); Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*.

⁴⁰Kebahagiaan dan kesejahteraan

⁴¹ Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*.

juga mengklaim dirinya sebagai penganut Aswaja, karena ajaran yang diterapkan atau dipraktikkan oleh para kyai (NU) disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, berakulturasi dengan kehidupan kultural dan sosial masyarakat Indonesia⁴². Namun, golongan yang mengaku Aswaja selain NU menerapkan agama dengan mengusung budaya arab tanpa memperhatikan budaya setempat (Indonesia).

Metode dakwah NU tetap memelihara adat yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia, dan menggiring kepercayaan atau adat pada syari'at Islam. Sesuai kaidah *al muhafadloh ala al-qoodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*. (melestarikan tradisi lama yang masih bagus dan selalu mencari tradisi baru yang lebih bagus)⁴³. Kenyataannya NU sebagai pergerakan masih menonjolkan satu ciri tradisi dengan berbagai bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warganya⁴⁴. Bentuk-bentuk amalan/praktik keagamaan yang menjadi ciri khas *Jam'iyah* NU seperti ziarah kubur, *haul*, *tawassul*, *tarawih* 20 *roka'at*, sholat subuh dengan *Qunut*, membaca *usholli*, *diba'an*, *barzanji*, dan sebagainya.

NU memiliki ciri khas normatif organisasi sebagai tradisi keagamaan yang selalu dipegang erat oleh *jama'ah* maupun *jam'iyah*nya. Ciri khas tersebut *Tawasuth dan I'tidal*, *Tasamuh*, *Tawazun*, dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Sikap-sikap normatif NU juga mempengaruhi perspektifnya dalam melihat kehidupan politik kenegaraan. NU menyebarkan paham tersebut melalui pendidikan yang berjangka panjang, yaitu pesantren dan madrasah serta dakwah harian di masjid dan madrasah⁴⁵.

Suatu hal yang amat mendesak untuk segera direspon setelah adanya NU adalah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dengan baik tetapi tetap berada dalam naungan NU. Hal seperti itu, di samping menandingi dan menanggapi pendirian lembaga pendidikan yang mengusung paham pembaruan sebagaimana dimotori para kaum Muslim reformis, yang sudah melenceng dari haluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dan tidak lagi berpatokan pada mazhab yang empat. Awal kelahiran *Jam'iyah* ini memiliki program kerja dari (*Hoofbestuur*) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terdiri atas tiga bidang pokok yaitu: Da'wah, Sosial, dan Pendidikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kegiatan Pendidikan yang

⁴² Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*.

⁴³ Zuhairi dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997); Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Moderasi, Keummatan, Dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010).

⁴⁴ Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*; Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*.

⁴⁵ Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Moderasi, Keummatan, Dan Kebangsaan*.

kemudian dikenal dengan Ma'arif merupakan Embrio kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadirnya LP Ma'arif NU yang murni dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan umat Islam, utamanya keadaan pendidikan umat Islam tradisional yang berbasis pesantren dan tidak terkoordinasi dengan baik. Melalui pendidikan, khazanah dan paham keagamaan serta upaya penguatan umat dapat dilakukan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Tahun 1927 tepatnya pada Mukhtar NU II, warga NU bersepakat menggalang dana untuk mendirikan madrasah dan sekolah. Pada Mukhtar berikutnya di 1928, para elite NU yang dipimpin oleh KH. Wahab Chasbullah mengadakan gerakan peduli pendidikan. Gagasan untuk mewisuda satuan-satuan pendidikan dalam sebuah badan hukum barangkali muncul pada Mukhtar IV tahun 1929 di Semarang yang memutuskan ada badan khusus di tubuh *Hoof Bestur Nahdlatul Oelama* (HBNO) membentuk bagian pengajaran/*Onderwijs* (sekarang Lembaga Pendidikan Ma'arif) yang waktu itu diketuai oleh Abdullah Ubaid.

Secara khusus, Nahdlatul Ulama (NU) 12 tahun setelah NU berdiri di Surabaya dalam Mukhtar XIII di Menes, Banten, pada tanggal 11 – 16 Juni 1938 telah membentuk divisi pendidikan yang diberi nama lembaga pendidikan Ma'arif dengan ketuanya K.H. Abdul Wahid Hasyim. Tujuan lembaga ini mewisuda dan mendirikan madrasah-madrasah/sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang tersebar di desa-desa maupun kota, agar ajaran *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Aswaja) benar-benar dapat berjalan di masyarakat muslim.

Bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan berdasarkan Agama Islam untuk membina manusia muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, berkepribadian serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. selain itu, LP Ma'arif NU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama. LP Ma'arif NU dalam perjalannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Perubahan NU menjadi partai politik 1953 berdasarkan hasil muktamar NU XXII di Jakarta tahun 1959 menjadikan Ma'arif sebagai Badan Otonom (Banom) dengan nama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU). Keputusan ini demi menjaga kemurnian misi pendidikan. Setelah tahun 1973 NU kembali menjadi Jam'iyah bukan partai politik maka Ma'arif kembali menjadi bagian NU mulai tahun 1977 sampai sekarang⁴⁶. NU merupakan organisasi masyarakat yang lahir dengan semangat pendidikan. Oleh sebab itu, organisasi ini berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas adil dan merata dengan tanpa meninggalkan ciri khas keagamaannya. NU juga aktif dalam setiap kali proses pembuatan kebijakan, peraturan bahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional khususnya yang berada pada Kementerian Agama.

Akibat konflik NU dengan rezim Soeharto di era 1970-an, akhirnya kondisi Kementerian Agama yang sejak masa kemerdekaan dipegang oleh Ulama NU, lepas dari genggamannya, yang pada masa terakhir itu dipimpin oleh K.H. Syaifuddin Zuhri. Lepasnya kementerian ini dari genggamannya NU berimplikasi amat besar kepada institusi NU termasuk andil NU dalam pendidikan di Indonesia. Nuansa ke-NU-an yang sangat kental pada era Orde Lama (Orla) yang diterapkan pada madrasah atau sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama dan madrasah-madrasah swasta, oleh Menteri Agama Ahmad Mukti Ali (menjabat 1973-1978), pengganti K.H. Syaifuddin Zuhri, dihilangkan sama sekali. NU dan LP Ma'arifnya termarginalkan. Lembaga-lembaga pendidikan di bawah NU memperoleh perlakuan diskriminatif. Kesan ini seperti terusan-menerus berlangsung sepanjang rezim Orde Baru (Orba) berkuasa⁴⁷.

Akibat dari perlakuan diskriminatif ini sekolah-sekolah menyembunyikan keterkaitan mereka dengan NU. Saat itu, tidak lagi terdengar istilah Madrasah Ibtida'iyah NU (MINU), Sekolah Dasar NU (SDNU), Madrasah Tsanawiyah NU (MTsNU), Sekolah Menengah NU (SMPNU/SMANU). Mereka menggunakan nama-nama yang kurang mencolok, seperti sekolah "Wahid Hasyim", nama mantan menteri Agama. Dengan alasan yang sama, pada tahun 1972, Universitas NU di Malang diberi nama Universitas Sunan Giri, nama salah seorang walisanga⁴⁸, Universitas NU di Bandung juga terpaksa harus berganti nama Universitas Islam Nusantara tahun 1970-an dan diikuti Universitas NU yang lainnya⁴⁹.

⁴⁶ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*.

⁴⁷ Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*.

⁴⁸ Feillard.

⁴⁹ Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Jember: Mesjid Sunan Kalijaga, 2004).

Pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang sama atas terwujudnya pendidikan yang mampu mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan arti pendidikan itu sendiri. Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) baik keagamaan layaknya *Nahdlatul Ulama'* (NU), *Jami'at Khair*, *Al-Irsyad*, *Jong Islamiten Bond*, Persatuan Islam (Pesis), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), *Jamiatul Washliyah*, atau non keagamaan layaknya Taman Siswa, Institut Budhi Darma, dan lain sebagainya yang mengurus pendidikan agar pendidikan di Indonesia semakin berkualitas, handal, dan seimbang dengan berbagai macam cara agar disepakati sebuah sistem pendidikan nasional yang bisa menjadi perwujudan semua harapan dan solusi segala masalah yang ada.

Sistem persekolahan nasional tidak hanya di bawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama "Sekolah" tetapi juga Kementerian Agama dengan nama "Madrasah" yang keduanya diakui pemerintah dan masyarakat terkait hak para lulusannya. Pada awal tahun 1970-an Kementerian Agama memberi pengakuan resmi terhadap Madrasah dengan syarat 70% proporsi waktu belajarnya diisi mata pelajaran umum, 30% mata pelajaran agama, kebalikan dari proporsi semula⁵⁰. Madrasah merupakan bentuk pendidikan yang muncul dari kalangan kaum muslim. Pada awalnya pendidikan Islam menjadikan Al Qur'an sebagai "*the foundation stone*"⁵¹. Seiring perkembangannya bermunculan bentuk institusionalisasi tradisi pembelajaran dalam Islam seperti Masjid, *Kuttab*, Madrasah, dan Rumah Guru sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran dalam masyarakat muslim. Sementara keilmuan institusi pembelajaran semakin beragam dan komplek. Di samping Al Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama doktrin Islam muncul berbagai ilmu lain.

Madrasah modern di Indonesia merupakan hasil racikan secara bersama-sama *environment* pesantren, gerakan pembaharuan Islam, dan sistem pendidikan kolonial Belanda⁵². Sehingga Madrasah di Indonesia merupakan jembatan yang menghubungkan antara lembaga pendidikan umum (sekolah-sekolah Belanda) dan lembaga pendidikan tradisional pesantren. Madrasah menawarkan pendidikan umum sebagaimana ditawarkan sekolah umum. Pada saat yang sama madrasah juga menawarkan pendidikan Islam sebagaimana ditawarkan pendidikan tradisional pesantren⁵³. Sehingga dapat dikatakan bahwa

⁵⁰ Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*.

⁵¹ Subhan Arif, *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Abad Ke-20* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁵² Arif.

⁵³ Dari sekolah umum madrasah mengambil sistem pendidikan modern, dan dari pesantren mengambil tradisi pembelajaran Islam.

madrasah pada awal abad ke-20 sudah mengalami konsolidasi sebagai lembaga pendidikan Islam modern. Di dalamnya terdapat mata pelajaran umum yang memadai yang diajarkan secara berdampingan dengan mata pelajaran agama. Sehingga dalam perkembangannya antara sekolah dan madrasah memiliki derajat yang sama setelah munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri yang lebih dikenal dengan SKB Tiga Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975. Inti kesepakatan tersebut adalah pengakuan bahwa madrasah adalah sama dan sederajat dengan sekolah. Sehingga berimplikasi terhadap madrasah. *Pertama*, madrasah memiliki nilai dan status yang sama dengan ijazah sekolah umum. *Kedua*, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan sebaliknya. *Ketiga*, siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat.⁵⁴

Simpulan

Nahdlatul Ulama merupakan Organisasi yang konsen terhadap pesantren. Dalam perkembangannya pesantren bermetamorfosis menjadi Lembaga Pendidikan formal yang mewujud dalam bentuk madrasah. Madrasah modern di Indonesia merupakan hasil racikan secara bersama-sama *environment* pesantren, gerakan pembaharuan Islam, dan sistem pendidikan kolonial Belanda. Sehingga Madrasah di Indonesia merupakan jembatan yang menghubungkan antara lembaga pendidikan umum (sekolah-sekolah Belanda) dan lembaga pendidikan tradisional pesantren. Madrasah menawarkan pendidikan umum sebagaimana ditawarkan sekolah umum. Pada saat yang sama madrasah juga menawarkan pendidikan Islam sebagaimana ditawarkan pendidikan tradisional pesantren. Sehingga dapat dikatakan bahwa madrasah pada awal abad ke-20 sudah mengalami konsolidasi sebagai lembaga pendidikan Islam modern. Sehingga melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri yang lebih dikenal dengan SKB Tiga Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975. Inti kesepakatan tersebut adalah pengakuan bahwa madrasah adalah sama dan sederajat dengan sekolah. Hal ini tidak lepas dari para agen perubahan yakni upaya Nahdlatul Ulama dalam membentuk struktur baru dalam masyarakat tanpa mengesampingkan atau menentang struktur yang ada khususnya dalam Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. Fatikhul Amin. "Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama: Universitas

⁵⁴ Arif, *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Abad Ke-20*.

- Islam Malang Tahun 1981-2010." Universitas Indonesia, 2021.
- — —. "Ritual Agama Islam di Indonesia dalam Bingkai Budaya." *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat 1* (September 23, 2018): 1–11. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/asdanu/article/view/231>.
- — —. *Sejarah: Apa, Bagaimana, dan Kenapa?(Perspektif Masa Kini)*. Pamekasan: IAIN Madura Press, 2019. <http://repository.iainmadura.ac.id/297/>.
- Arif, Subhan. *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Aziz DY, Aceng Abdul. Dkk. *Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah: Sejarah, Pemikiran, Dan Dinamika NU Di Indonesia*. Jakarta: LP Ma'arif NU, 2015.
- — —. *Islam Ahlusunnah Waljamaah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*. Jakarta: PP LP Ma'arif NU, 2015.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Fealy, Greg dan Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal. Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Feillard, Andree. *NU Vis-a-Vis Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- — —. "The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration." In *Practicing History*, edited by Gabrielle M Spiegel. New York: Routledge, 2005.
- Mahfudh, Sahal. *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Moderasi, Keummatan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Muzadi, Muchith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Jember: Mesjid Sunan Kalijaga, 2004.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. 8th ed. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.
- Zuhairi dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

